

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi, sebagai negara yang menganut paham demokrasi Indonesia memerlukan partisipasi aktif dari seluruh warga negara tidak terkecuali masyarakat agar proses demokrasi dapat berjalan dengan maksimal. partisipasi masyarakat dalam politik sangat dibutuhkan. Jumlah masyarakat yang begitu besar tidak diimbangi oleh partisipasi politik yang tinggi, sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan partisipasi politik tersebut.

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui berbagai komitmen nasional dan internasional. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengarusutamaan gender telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik

dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Meskipun partai-partai politik berusaha untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, dominasi laki-laki dan pola pikir patriarkis yang sudah menancap dalam para pemimpin di partai politik yang ada di Indonesia, merupakan salah satu faktor utama penentu bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik dan mempengaruhi agenda politis partai-partai politik tersebut.

Berbicara dalam bidang politik pemerintahan, hak setiap warga negara dalam politik pemerintahan adalah hak memilih dan hak dipilih. Hak memilih bisa digaris bawahi adalah keaktifan dalam pelaksanaan pemilu sedangkan hak dipilih yakni ikut dalam menduduki kursi legislatif dan eksekutif yang secara langsung ikut serta dalam merancang, menyusun dan menjalankan kebijakan yang berdampak kepada seluruh warga negara.

Partisipasi politik kaum perempuan merupakan salah satu bentuk keterlibatan dalam pengembangan sebuah negara secara kooperatif. Partisipasi politik pada dasarnya berasal dari kesadaran individu ataupun kelompok untuk turut terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan dan turut serta dalam pengembangan suatu negara. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik

mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Berbagai perangkat hukum telah dikeluarkan dan ditetapkan untuk melaksanakan proses menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi realita yang terjadibahwa semua itu belumlah cukup untuk berfungsi sebagai piranti kekuatan yang menghantarkan kaum perempuan menjadi mitra sejajar dengan kaum laki-laki.

Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya. Perempuan seharusnya mampu dan terlibat dalam dunia politik agar itu menjadi budaya masyarakat Indonesia yang demokrasi. Budaya politik ketelibatan perempuan harus bisa dikembangkan agar perturan dan Undang-undang yang ditetapkan untuk kesamaan hak dalam pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Sehingga berdampak pada nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Budaya politik yang partisipatif sebagai suatu sistem nilai kebersamaan masyarakat yang sadar ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai

Budaya politik harus dikembangkan, kemudian dipraktikkan pada suatu masyarakat Indonesia yang memiliki asas demokrasi

Berdasarkan pengamatan secara faktual di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, bahwa masyarakat pedesaan, masih banyak yang belum memahami budaya politik dan partisipasi politik. Terutama terhadap kaum perempuan, sehingga terlihat bahwa perempuan masih lebih banyak menjadi objek ketimbang menjadi subjek dalam segala hal. Ini disebabkan oleh banyak faktor ketidakpahaman dan ketidakmauan/motivasi dari perempuan. Dapat dilihat bahwa aparatur pemerintahan desa, lebih dominan laki-laki ketimbang perempuan, bahkan pada saat rapat RT, rapat RW, rapat dengan pemerintah, dan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kurang terlibat.

Keterlibatan perempuan di Desa Antutan dalam membangun budaya politik bisa dikatakan terbatas, mengingat bahwa mereka lebih cenderung banyak menghabiskan waktu di rumah dibanding terlibat dalam kegiatan politik. Misalnya mengikuti kegiatan rapat di Balai desa, membuat program kerja desa Antutan, dan tidak ada perempuan yang menjabat sebagai ketua RT ataupun ketua RW.

Namun partisipasi politik dalam kegiatan pemilihan presiden, gubernur, bupati, anggota DPR dan Kepala desa kaum perempuan sudah berpartisipasi karena mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pemilihan dengan memberikan kartu suara pemilihan. Kegiatan tersebut tentu sangat

penting dalam membangun budaya politik di desa Antutan agar perempuan merasa dilibatkan dan memiliki motivasi dalam kegiatan politik.

Kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam politik tentu berdampak pada budaya politik yang ada di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Kurang partisipasi disebabkan karena kurangnya keterampilan politik dan kepercayaan diri, persepsi politik urusan laki-laki serta tanggung jawab merawat keluarga merupakan beberapa hambatan pribadi dan psikologis yang dialami oleh perempuan dalam berpartisipasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelii tertarik meneliti dengan judul "Partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah maka, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut di atas maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian ilmiah tentang partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan untuk mendapatkan kajian tentang faktor penghambat partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan landasan dalam menganalisis faktor penghambat partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik mengingat bahwa perempuan kurang memiliki motivasi dalam berpartisipasi. Serta dapat dijadikan sebagai kajian dalam menyelesaikan faktor penghambat partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Teori

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*participation*” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, 2006: 655).

Slamet (2003) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.

Selanjutnya menurut Slamet (2003: 8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

- a. Partisipasi politik (political participation),
- b. Partisipasi social (sosial participation),
- c. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- b. Partisipasi social (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
- c. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan

proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada.

2. Teori Partisipasi Politik

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas system politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung daei keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perem (Rush Althoff, 2003: 122).

Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas, mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan

warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Para ilmuan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang telah mengenai partisipasi politik.

Menurut Coen Husain Pontoh (2005: 13) pengertian yang luas mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan. bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.

Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi. Disebabkan oleh sejumlah alasan berikut: pertama, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip daripada di alam realitas. Kedua, dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya. Ketiga, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi karena faktor internalisasi pada akhirnya akan menjadi partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi dimobilisasi. Dari beberapa bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan

peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik.

Menurut Mas'ood dan MacAndrews (2000: 225) partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. **Electroral activity**, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
- b. **Lobbying**, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
- c. **Organizational activity**, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
- d. **Contacting**, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya,

dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya.

- e. **Violence**, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.

Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut maka Paige seperti yang dikutip Ramlan Surbakti (2010: 184) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe yaitu:

- a. Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi.
- b. Apatis, yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, dan apabila partisipasi politik cenderung pasif tertekan.
- c. Militian Radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, dan
- d. Pasif, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.

Secara umum Tipologi partisipasi adalah sebagai kegiatan yang dibedakan menjadi :

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses-proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk merumuskan kebijakan umum, memilih pemimpin daerah dan sebagainya.

- b. Partisipasi Pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan. (Rahman, 2007: 282).

3. Pemahaman Tantang Perempuan

a. Pengertian Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.

Namun menurut Zaitunah Subhan (2004: 19) kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want, atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schendalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampainya adalah wanted (dibutuhkan atau dicari). Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadilebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. (Muthahari, 1995:110).

b. Peran Gender

Kemampuan pekerjaan suami tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Sebab itu para perempuan kepala keluarga bekerja untuk tambahan kebutuhan hidup mereka agar terpenuhi. Dan beban gender lebih sering dialamatkan kepada perempuan. Ia yang sudah berperan ganda dalam keseharian, mengurus anak sekaligus membantu mencari nafkah atau menjadi pencari nafkah tunggal di keluarganya. Ia sering dituntut berperan di ranah publik sekaligus di ranah domestik. Ia yang karena menjadi pejabat di sebuah kantor, misalnya. Dituntut untuk eksis dengan jabatannya, dan ia sebagai ibu rumah tangga, dituntut juga harus berhasil mendidik anak dan

melayani suami. Peranganda sekaligus beban ganda seperti itu yang banyak dialami perempuan. Perempuan yang telah mengganti fungsi suami menjadi kepala keluarga, adalah para isteri dengan segala persoalan yang dihadapi. Peran itu sangat kompleks, menyangkut pengadaan nafkah, pengamanan keluarga, perlindungan keluarga, pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Dengan adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat lemah lembut, rajin dan disiplin. Berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya banyak perempuan harus bekerja keras dalam menjaga kebersihan rumah mulai dari menyapu, mengepel, mencuci, memasak hingga merawat anak. Dikalangan perempuan tidak mampu beban seperti ini sangatlah berat untuk ditanggung oleh perempuan. (Mansour Fakih, 2008: 21).

4. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik baik masyarakat maupun santri.

Larry Diamond (2003) mendefinisikan *political culture* sebagai seperangkat keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentiment dan evaluasi suatu

masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.

Miriam Budiardjo (2007: 49) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat.

Menurut Gabriel A. Almon and Bingham Powell dalam (Rusadi Kantrapawira, 2002: 42) budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kelompok antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik santri. Dengan memahami budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua manfaat. Pertama, sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu. Kedua, dengan memahami hubungan antara budaya politik dan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem

politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

5. Tipologi Budaya Politik

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (1990) membagi budaya politik tiga jenis, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa aktor politik individual berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam dalam pembuatan kebijaksanaan atau dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (1990) ada beberapa jenis tiga tipe ideal budaya politik berikut:

a. Budaya Politik Parokial (parochial political culture)

Dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap empat dimensi tersebut diatas sangat rendah. Tidak ada peran-peran politik masyarakat yang bersifat khusus, sehingga peranan politik, baik yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius sepenuhnya diserahkan kepada pengambil kebijakan/pemimpin yang biasanya dipegang oleh seorang kepada suku/adat, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat yang peranannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

b. Budaya Politik Subjek (subject political culture)

Dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap dimensi pengetahuan dan pemahaman cukup tinggi, tetapi masih bersifat pasif, artinya masyarakat sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, namun mereka belum memiliki orientasi dimensi pemahaman mengenai penguatan kebijakan dan partisipasi dalam kegiatan politik, mereka tidak memiliki keinginan dan kemauan untuk mencoba menilai, menelaah, atau mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mereka menerima apa adanya, sehingga sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua kelompok, ada yang menerima atau menolak.

c. Budaya Politik Partisipan (participian political culture)

Dimana pada tingkat tersebut frekuensi orientasi masyarakat terhadap empat dimensi tersebut di atas lebih baik, masyarakat mulai bersifat aktif dalam peran-peran politik, meskipun perasaan dan evaluasi masyarakat terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Budaya politik yang berkembang di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Kondisi masyarakat yang heterogen selain dapat memberkaya berkembangnya budaya politik yang beragam, juga dapat menjadi suatu ancaman terhadap keutuhan bangsa. Untuk menghindari terjadi disintegrasi bangsa, perlu kiranya menanamkan nilai-nilai dasar yang dapat mengikatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti toleransi, kekeluargaan, musyawarah mufakat, gotong

royong, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang terpenting dalam hal ini adalah bukan membicarakan perbedaan yang ada tetapi bagaimana menyatukan pandangan yang lebih menekankan pada kepentingan nasional.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penyempurnaan penelitian:

1. Priandi, Rizki. 2019. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Hingga saat ini partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu Persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.
2. Nur Hidayahb, Moh Aris Munandar. 2013. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Desa Tasik Agung Dalam Berpartisipasi Politik. Faktor yang mempengaruhi perempuan Desa Tasik Agung dalam berpartisipasi politik adalah pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor keluarga masuk dalam internal yang di karenakan adanya pengaruh

dari orang tua yang bergelut di dunia politik sehingga mampu mempengaruhi anak atau saudara dari orang tuanya tersebut untuk terjun dalam partai politik orang tuanya sebagai pendukung; Sedangkan dari faktor lingkungan masyarakat masuk dalam eksternal yang dikarenakan adanya suatu klaim dari desa setempat bahwa desa itu menjadi pendukung salah satu partai politik tertentu maka dari orang yang menjadi pendukung partai politik tersebut mempengaruhi para warga untuk ikut mendukung partainya dengan ditambah lagi karena adanya jaringan keluarga yang banyak di sana, maka bisa dengan mudah mempengaruhi warganya atau tetangga dengan memilih partai politik tertentu tersebut; faktor ekonomi, bahwa dengan adanya keadaan ekonomi yang seadanya membuat perempuan di Desa Tasik Agung kebanyakan memberikan partisipasinya atas dasar banyaknya pemberian dari caleg.

3. Listyaningsih. 2016. Model Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Di Kota Serang Propinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan, peran dan fungsi perempuan pesisir yang menunjukkan semakin terbukanya ruang partisipasi namun perempuan masih belum terlibat secara aktif, yang mana hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya tingkat pendidikan. Model yang dirancang untuk peningkatan partisipasi politik adalah dengan menggunakan grass root approach yang melibatkan semua strata di masyarakat terutama perempuan dan kelompok miskin.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian yaitu peneliti Priandi, Rizki (2019) dengan judul Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan yaitu mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Selanjutnya penelitian yang dijadikan referensi yaitu Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Desa Tasik Agung Dalam Berpartisipasi Politik dan Model Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Di Kota Serang Propinsi Banten. Penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik, dan penelitian yang dilakukan Listyaningsih. 2016, dimana dalam penelitian tersebut memperoleh hasil Model yang dirancang untuk peningkatan partisipasi politik adalah dengan menggunakan grass root approach yang melibatkan semua strata di masyarakat terutama perempuan dan kelompok miskin.

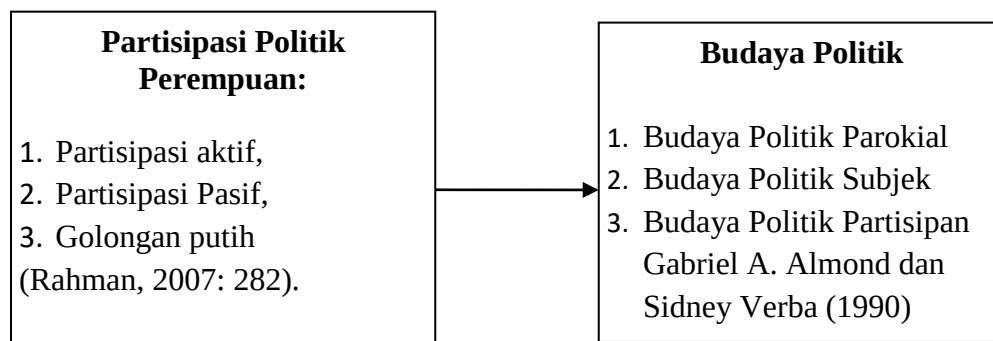
Penelitian yang dilakukan ini berorientasi dalam membangun partisipasi kaum perempuan agar terciptanya budaya politik. Penelitian ini mengkaji dan mengetahui bagaimana membangun budaya politik pada kaum perempuan agar mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan politik.

C. Alur Pikir Penelitian

Kerangka penelitian adalah konsep suatu penelitian yang menghubungkan antara visualisasi satu variabel dengan variabel lainnya,

sehingga penelitian menjadi tersusun secara sistematis dan dapat diterima oleh semua pihak. Penelitian ini berpedoman pada teori (Ramlan Surbakti, 2010: 184) tentang partisipasi politik yaitu aktif, apatis, militan radikal, dan pasif. Dari pendapat tersebut dapat dikembangkan dalam sebuah penelitian bahwa bagaimanakah partisipasi kaum perempuan di desa Antutan dalam membangun budaya politik. Apakah mereka aktif, memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, apakah mereka bersikap apatis, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah. Militan radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, dan atau pasif, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.

Berikut ini kerangka pikir partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang menggunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melalui generalisasi yang menjelaskan suatu gejala atau kenyataan sosial yang berlangsung. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Kaelan, M.S (2005: 5) mengartikan metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata bisa lisan untuk penelitian sosial, budaya dan filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian.

Metode deskriptif dalam penelitian ini yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian dan mendeskripsikan partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan sesuai dengan obyektif yang ada di lapangan. Data yang berupa deskriptif tersebut berasal dari wawancara, observasi, foto, dan dokumen resmi lainnya.

B. Penetapan Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Mayoritas penduduk adalah Dayak dan

Bulungan dengan jumlah penduduk 1107 Jiwa. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2020 sampai Agustus 2020.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkupnya dan batasan yang akan diteliti, maka yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

D. Pemilihan Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005: 171-172).

Informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memberikan pendapat atau jawaban

terkait dengan partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Dari penjelasan yang sudah diterangkan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan kunci, (*key informan*) mencakup:
 - a. Kepala desa Antutan
 - b. Sekertris desa Antutan
 - c. Kaur Pemerintah
 - d. 4 orang selaku ketua RT
 - e. Perempuan 8 orang yang memiliki latar belakang pendidikan
2. Informan biasa yaitu Tokoh masyarakat 7 orang
3. Informan tambahan yaitu masyarakat desa Antutan 7 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara melalui:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72).

Interview dilakukan dengan informan yaitu Kepala Desa Antutan, sekretaris desa Antutan, ketua RT, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa Antutan. Tujuannya usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk-dijawab secara lisan pula terkait dengan partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

2. Teknik Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Menurut Bungin (2007: 115-117) mengemukakan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana aktivitas perempuan untuk membangun budaya politi di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, dan bagaimana

keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta terlibat langsung atau memiliki jabatan dalam organisasi pemerintahan desa Antutan.

3. Teknik Dokumen

Menurut Sugiyono (2008; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya.

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, video, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumen yang dibutuhkan terkait dengan partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan yaitu bentuk jabatan yang melibatkan kaum perempuan, dokumentasi keterlibatan perempuan dalam agenda rapat, bentuk kegiatan kaum perempuan terlibat dalam kegiatan pemulu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 91) yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan

sebenarnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model alir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 91) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentayang dikumpulkan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan. Data yang diperoleh dilapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat gugus, membuat pertisi, menulis memo dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh dilapangan, kemudian dari data itu mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan focus penelitian. Reduksi data/proses transformasi itu berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

Reduksi data yang dilakukan terkait dengan judul partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan bertujuan untuk menggambarkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik. Data yang dikumpulkan berdasarkan pada rumusan masalah, selanjutnya di pilih data-data hasil wawancara tersebut agar mempermudah peneliti untuk melihat dan membandingkan hasil wawancara.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara penelusuran atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

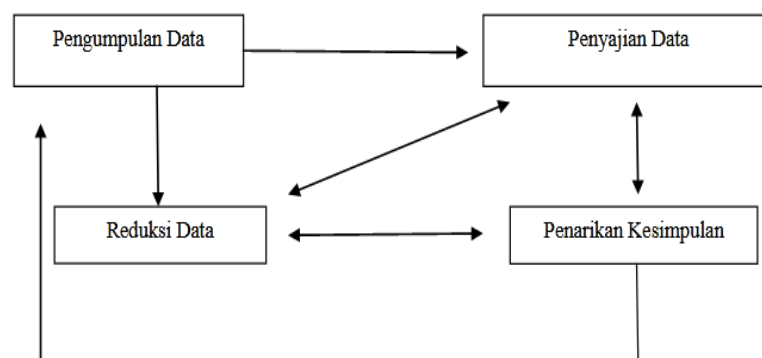
Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan kepala desa dan informan lainnya serta data hasil observasi selama penelitian. Data yang dikumpul dan disimpulkan adalah data tentang partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan Kesimpulan merupakan suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung untuk mencari data tentang partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Sedang verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama peneliti mencatat atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesempatan inter subjektif” dengan kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya (validitasnya).

Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara kontinyu sepanjang penelitian verifikasi oleh peneliti, dimaksudkan untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul, sehingga terbentuk proposisi tertentu yang bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori.

Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.



Gambar 3.1 Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013: 92)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi atau tempat yang diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh penulis. Lokasi yang akan diteliti oleh penulis adalah desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi dan gambaran subyek peneliti.

1. Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 4.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Laki-laki dan Perempuan	Jumlah	Orang
Jumlah laki-laki	1,091	Orang
Jumlah perempuan	1,107	Orang
Jumlah total	2,198	Orang
Jumlah kepala keluarga	607	KK

Sumber Data : Kantor Desa Antutan Tahun 2021

Jumlah penduduk masyarakat desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas berjumlah 2,198 orang, mayoritas laki-laki berjumlah 1,091 orang dan perempuan berjumlah 1,107 orang. Jumlah perbandingan yaitu perempuan lebih banyak dengan jumlah 16 orang. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 607 KK.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan struktur pendidikan yaitu belum sekolah berjumlah 82 orang, tidak pernah sekolah berjumlah 146 orang, pernah sekolah dasar (SD) tapi tidak tamat berjumlah 42 orang, tamatan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 423 orang, tamatan Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 275 orang, tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berjumlah 434 orang, tamatan Akademi (D1, D2, D3) berjumlah 12 orang, tamatan sarjana (S1) 125 orang, S2 belum ada, S3, belum ada). Dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	82
2	Tidak pernah sekolah	146
3	Sekolah SD tapi tidak tamat	42
4	Tamat SD	423
5	Tamat SLTP	275
6	Tamat SLTA	434
7	Akademi (D1,D2,D3)	12
8	S1	125
9	S2	-
10	S3	-

Sumber Data : Kantor Desa Antutan Tahun 2021

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian yaitu usaha tani/berladang berjumlah 724 orang, Pegawai Negri Sipil 49 orang, swasta berjumlah 260 orang, pedagang 130 orang, peternak 7 orang, pedagang berjumlah 44 Orang, dan nelayan mencapai 8 orang . lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pecaharian	Jumlah	Orang
1	Petani	...724....	Orang
2	Buruh / Swasta	...260....	Orang
3	Pengawai Negeri	...49....	Orang
4	Pedagang	...44....	Orang
5	Nelayan	...8....	Orang

Sumber Data : Kantor Desa Antutan Tahun 2021

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu Islam berjumlah 913 Orang, Katolik berjumlah 332 orang, Kristen protestan 934orang dan tidak ada penduduk yang memeluk agama Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Antutan berikut ini :

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Orang
1	Islam	...913.....	Orang
2	Kristen	...934.....	Orang
3	Katholik	...332.....	Orang
4	Hindu		Orang
5	Budha		Orang

Sumber Data : Kantor Desa Antutan Tahun 2021

5. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Antutan merupakan potensi yang sangat membantu masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan. Sumber daya alam yang ada digunakan oleh masyarakat untuk pemukiman, perkebunan,

lapangan, dan hutan lindung.berikut ini data tentang potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Desa Antutan Kecapata Tanjung Palas.

Table 4.5 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Umum		Luas	Hatar (Ha)
Luas Desa	=	40.750	Ha
Tanah Sawah			
Sawah Irigasi Teknis	=	0	Ha
Sawah Irigasi 1/2 Teknis	=	0	Ha
Sawah Tadah Hujan	=	250	Ha
TANAH KERING			
Tugal/Ladang	=	500	Ha
Pemukiman	=	400	Ha
TANAH BASAH			
Tanah Rawa	=	150	Ha
Pasang Surut	=	0	Ha
TANAH PERKEBUNAN			
Tanah Perkebunan Rakyat	=	3252	Ha
Tanah Perkebunan Negara	=	0	Ha
Tanah Perkebunan Swasta	=	3.7	Ha
TANAH FASILITAS UMUM			
Kas Desa	=	6	Ha
Lapangan	=	1	Ha
Perkantoran Pemerintah	=	2	Ha
Lainnya	=	4	Ha
TANAH HUTAN			
Hutan Lindung	=	150	Ha
Hutan Produksi	=	300	Ha
Hutan Konversi	=	0	Ha

Sumber Data : Kantor Desa Antutan Tahun 2021

6. Prasarana Pemerintahan

Kebanyakan Prasarana dan sarana umum di Desa Antutan dalam keadaan baik dan masih terawat. Jika dikategorikan, sarana dan prasarana umum yang tersedia di Desa Antutan berupa sarana dasar penyelenggaraan

pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan, perekonomian, dan keamanan. Adapun jumlah dan kondisi prasarana dan sarana umum di Desa Antutan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Prasarana Pemerintahan Desa Antutan

No	Prasarana Pemerintahan	Keterangan	
1	Balai desa / sejenisnya	Ada	Unit
2	Kantor Desa	Ada	Unit
3	Jumlah komputer/Lap top	10	Buah
4	Jumlah meja	10	Buah
5	Jumlah kursi	10	Buah
6	Jumlah lemari arsip	5	Buah
7	Jumlah balai dusun/sejenisnya	1	Buah
8	Sumur gali/bor	30	Unit
9	Mata air	1	Unit
10	Depo Isi Ulang	3	Unit
11	Bak penampungan	1	Unit
12	Jumlah MCK	13	Unit
13	Pengguna MCK	13	KK
14	Pengguna air sungai	500	KK
15	Jumlah masjid	1	Unit
16	Jumlah langgar/surau/mushola	4	Unit
17	Jumlah gereja kristen	2	Unit
18	Jumlah gereja katholik	1	Unit
19	Lapangan sepak bola	1	Buah
20	Lapangan bulu tangkis	4	Buah
21	Meja pimpong	3	Buah
22	Lapangan voli	7	Buah
23	Sekolah SD dan SMP	2	Unit
24	TK	1	Unit
25	Posiandu	1	Unit
26	Pos Kambling	5	Unit

Sumber Data : Kantor Desa Antutan Tahun 2021

7. Infrastruktur Jalan Desa

Infrastruktur berupa jalan adalah fasilitas yang dimiliki oleh desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas yang bermanfaat bagi masyarakat dalam beraktivitas. Jalan desa yang dibangun sudah cukup baik dan sehingga mengurangi debu atau polusi udara. Jalan antara desa sudah sangat baik dan beraspal sepanjang 12 KM. Sedangkan kondisi jalan badan di desa Antutan masih semenisa mencapai 2,5 KM.

Tabel 4.7 Infrastruktur Jalan Desa Antutan

Jalan Desa	Kondisi Baik (km atau unit)	Kondisi Rusak (km atau unit)
Panjang jalan aspal	12	3
Panjang jalan makadam		
Panjang jalan tanah	10	60
Jalan Antar Desa/Kecamatan	Baik	Rusak
	(km atau unit)	(km atau unit)
Panjang jalan aspal	12	0.5

Sumber Data : Kantor Desa Antutan Tahun 2021

8. Kelembagaan Ekonomi

Pembangunan desa Antutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana berupa kelembagaan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut ini merupakan kelembagaan ekonomi yang ada di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas:

Tabel 4.8 Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan Ekonomi	Jumlah	Lembaga
Koperasi	3	Unit
Jumlah Anggota	1,500	Orang
Industri Makanan (Home Industries)	3	Unit
Jumlah Anggota	15	Orang
Warung Klontong/Sembako	25	Unit
Jumlah Anggota	50	Orang
Angkutan	20	Unit
Jumlah Anggota	20	Orang
Pasar	1	Unit
Usaha Peternakan	2	Unit
Jumlah Tenaga Kerja	5	Orang
Usaha Perikanan	2	Unit
Jumlah Tenaga Kerja	3	Orang
Usaha Perkebunan	2	Unit
Jumlah Tenaga Kerja	350	Orang

Sumber Data : Kantor Desa Antutan Tahun 2021

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun deskripsi hasil penelitian yang diperoleh penelitian tentang partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi untuk membangun demokrasi yang baik. Partisipasi perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas

Kabupaten Bulungan ditunjukan dengan sebagai kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung. Kegiatan kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan belum maksimal karena hanya terbatas pada saat kegiatan pemilihan saja.

Berikut Hasil Wawancara dengan Aminudin selaku kepala desa Antutan, dia menjelaskan partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan yaitu ...

Melihat kaum perempuan dalam membangun budaya politik dari partisipasi terlihat pada saat kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legeslatif, dan pemilihan kepala desa. (wawancara, 16 Juni 2021).

Partisipasi perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan dapat dikatakan sudah aktif pada saat kegiatan pemilu/pemilihan kepala daerah karena, mereka turut menyampaikan suara sesuai dengan undangan surat suara. Setiap ada kegiatan pemilihan, kaum perempuan di desa Antutan terlibat dalam menggunakan hak suara.

Selanjutnya menurut Riyon Rikartu selaku Sekertaris desa Antutan menyampaikan pendapat tentang partisipasi kamperempuan dalam membangun budaya politik yaitu.....

Dengan terlibat dalam menggunakan hak suara pada saat pemilihan merupakan wujud nyata bahwa kaum perempuan sudah berpartisipasi dalam membangun budaya politik di desa Antutan. Mereka juga mengenal calon yang akan dipilih, walaupun secara keseluruhan

mereka tidak menghafal nama-nama calon, tetapi calon yang mereka mau pilih, pasti sudah dikenal dengan baik. (wawancara, 16 Juni 2021).

Budaya politik partisipan yang dibangun oleh kaum perempuan di desa Antutan merupakan budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran politik sehingga kaum perempuan di desa Antutan antusias mengikuti kegiatan pemilihan yang diselenggarakan.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Edi Mulyadi selaku staf kantor desa Antutan, menjelaskan bahwa.....

Partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik dapat terlihat saat ada kegiatan pemilu, pemilihan kepala daerah, dan pileg namun untuk terlibat dalam menyampaikan pendapat saat rapat di kantor desa, kaum perempuan kurang berpartisipasi (wawancara, 16 Juni 2021).

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Djamiat selaku ketua RT 4 desa Antutan menjelaskan bahwa :

Partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan hanya pada saat pelaksanaan kegiatan pemilihan umum, pelkada, pileg, pildes, dan menjadi tim sukses ketika ada kegiatan pelkada, pileg, pildes (wawancara, 17 Juni 2021).

Dipertegaskan oleh Hasil Wawancara dengan Aminudin selaku Kaur pemerintah desa Antutan yaitu

Kaum perempuan terlihat jelas pada saat kegiatan pemilihan di desa Antutan tetapi pada saat kegiatan rapat dan menyampaikan aspirasi saat mengambil kebijakan terkait pembangunan masih kurang (wawancara, 16 Juni 2021).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik sudah terlihat pada saat kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislative, dan pemilihan kepala desa. Keterlibatan kaum perempuan dalam pemilihan tentunya suatu dorongan dan kesadaran politik bahwa dengan menggunakan hak suara merupakan hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk memilih dan menentukan pemimpin selanjutnya.

2. Partisipasi Pasif

Dalam perkembangannya, budaya bisa menjadi penentu dan penilai dari ciri khas suatu masyarakat. Perkembangan kemajuan berpikir manusia telah mengubah tata cara berbudaya di masyarakat termasuk adat istiadat dan budaya normative yang dimiliki oleh masyarakat salah satunya adalah budaya dalam berpolitik. Namun keterlibatan kaum perempuan dalam membangun budaya politik belum dapat berjalan dengan maksimal, mengingat bahwa kaum perempuan di desa Antutan disibukan dengan rutinitas iburumah tangga.

Berikut ini hasil wawancara dengan Djamiat selaku ketua RT 4 desa Antutan tentang partisipasi pasif kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan :...

Kaum perempuan di desa Antutan bias dikatakan belum sepenuhnya berperan dalam membangun budaya politik, mereka hanya berperan sebatas terlibat dalam pemilihan dan menjadi pengurus/ panitia saat pemilihan umum, pilkada, pileg, dan pildes. (wawancara, 17 Juni 2021).

Demikian hasil wawancara dengan Jafar selaku ketua RT 13 desa Antutan berpendapat tentang partisipasi pasif perempuan dalam membangun budaya politik yaitu:

Kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan menurut saya masih pasif, karena di desa Antutan perempuan tidak pernah jadi legislator, Kepala Desa, atau ketua RW/RT, dan saat kegiatan rapat desa kaum perempuan tidak terlihat (wawancara, 17 Juni 2021).

Kondisi dimana kaum perempuan belum sepenuhnya berpartisipasi aktif dalam membangun budaya politik di desa Antutan akan berdampak pada cara pandang kaum perempuan di desa Antutan cenderung lebih mementingkan diri sendiri dan sibuk dengan diri sendiri dibanding dengan terlibat mengurus politik di desa Antutan. Partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik lebih pasif karena kurangnya keterlibatan perempuan dalam mengurus urusan pemerintahan, mereka lebih percaya kepada kaum laki-laki yang terlibat dalam politik di desa Antutan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Budimansyah selaku ketua RT 10 desa Antutan menjelaskan tentang partisipasi pasif perempuan dalam membangun budaya politik yaitu ;....

Menurut saya kaum perempuan di desa Antutan cenderung pasif ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan pendapat atau keinginan mereka lebih cenderung diam dan tidak mau protes langsung terkait dengan kebijakan yang dibuat (wawancara, 17 Juni 2021).

Kaum perempuan di desa dalam membangun budaya politik, harus ada aspirasi dan pendapat yang disampaikan oleh kaum perempuan jika benar-benar mau membangun budaya politik. Namun selama ini, kaum perempuan di desa Antutan tidak merespon atau tidak mau tau dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa walaupun tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Partisipasi pasif tentu akan berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan daripada budaya politik di desa Antutan.

Ditegaskan oleh hasil wawancara dengan Badrun selaku ketua Rt 3 desa Antutan, mengatakan bahwa....

Menurut saya partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan terkait mengambil keputusan dan terlibat langsung pengurus partai, atau menjabat di desa seperti ketua Rt, ketua BPD, ataupun mencalonkan diri jadi anggota DPRD bisa dikatakan pasif (wawancara, 17 Juni 2021).

Peran-peran politik kaum perempuan di desa Antutan yang bersifat khusus seperti dalam kegiatan pemilihan, tetapi yang berkaitan dengan kebijakan dan aturan diserahkan kepada pengambil kebijakan/pemimpin yang biasanya dipegang oleh kepala desa, suku/adat, tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat yang peranannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan partisipasi kaum perempuan dalam pemilihan pemimpin sangat berperan.

3. Golongan Putih

Partisipasi kaum perempuan di desa Antutan dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala

desa sudah terlihat baik. Oleh karena itu jarang sekali yang golongan putih (Golput). Golput (Golongan Putih) merupakan sikap dari kaum perempuan untuk tidak memilih calon yang ditawarkan dalam Pemilu. Caranya macam-macam mulai dari tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hasil wawancara dengan Hanna Purwanti S.Pd selaku masyarakat desa Antutan tentang golput kaum perempuan di desa Antutan yaitu :...

Menurut saya, kaum perempuan di desa Antutan jarang sekali yang Golput, rata-rata mereka menggunakan hak suara dengan datang sendiri ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) (wawancara, 19 Juni 2021).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Fatimah Ismawati S.Pd selaku masyarakat desa Antutan menjelaskan tentang partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik yang berkaitan dengan golput yaitu

Saya selaku kaum perempuan jarang sekali golput karena sayang kalau tidak menggunakan hak suara pemimpin yang kita kenal (wawancara, 19 Juni 2021).

Hasil Wawancara dengan Faridah S.Gz selaku masyarakat desa Antutan mengatakan bahwa...

Saya selalu menggunakan hak suara saya untuk memilih pemimpin yang menurut saya baik, jadi saya jarang golput.(wawancara, 19 Juni 2021).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan sudah dilaksanakan saat adanya kegiatan pemilihan umum, pilkada, pileg, dan pildes. Kaum perempuan selalu menggunakan hak suara

untuk memilih pemimpin yang dikenal dan memiliki visi dan misi yang jelas. Kesadaran kaum perempuan di desa Antutan untuk tidak golput merupakan kesadaran politik dalam memilih pemimpin yang demokratis.

Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan di desa Antutan terkait dengan partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan :

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Masyarakat parokial enggan terlibat dalam kepentingan politik di luar daerahnya, misalnya pemilihan presiden, DPR, dll. Mereka hanya mau terlibat dalam urusan politik yang ada di daerahnya, seperti pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, ketua komunitas, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik cenderung bersifat budaya politik parokial, dimana kaum perempuan hanya lebih tertarik dalam pemilihan di daerah, terutama di desa.

Berikut ini hasil wawancara dengan Irawati A.Md KEP selaku masyarakat desa Antutan yang menjelaskan tentang budaya politik parokial pada kaum perempuan di desa Antutan :....

Menurut saya, kaum perempuan di desa Antutan tidak terlalu tertarik dengan politik, atau pemilihan umum, atau pemilihan anggota DPR, tetapi mereka lebih cenderung tertarik mengikuti kegiatan pemilihan

kepala daerah, misalnya bupati, ataupun kepala desa (wawancara, 19 Juni 2021).

Dikatakan kaum perempuan di desa Antutan lebih bersifat menganut budaya politik parokial karena tingkat kesadaran warga, khususnya kaum perempuan terhadap kewenangan dan aturan pusat masih rendah, dan kaum perempuan di desa Antutan lebih antusias pada politik yang berada di dalam wilayahnya atau yang punya interaksi langsung dengan mereka. Misalnya berkaitan dengan pemilihan bupati, DPRD, ataupun kepala desa.

Selanjutnya Hasil Wawancara dengan Siti Jariah A.Md Bid selaku masyarakat desa Antutan mengatakan tentang budaya politik parokial pada kaum perempuan di desa Antutan yaitu

Saya menilai bahwa kaum perempuan tidak terlalu tertarik mengikuti kegiatan politik misalnya presiden, atau DPR. Mereka hanya sekedar mengikuti pemilihan tetapi tidak memahami dengan visi dan misi dari calon yang dipilih (wawancara, 19 Juni 2021).

Demikian hasil wawancara dengan Okta Ariani S.Pd selaku masyarakat desa Antutan mengatakan tentang budaya politik parokial pada kaum perempuan di desa Antutan yaitu

Partisipasi kaum perempuan di desa Antutan lebih cenderung tertarik mengikuti kegiatan politik tingkat desa, karena mereka sudah mengenal calon kepala desanya. (wawancara, 19 Juni 2021).

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa budaya politik parokial pada kaum perempuan di desa Antutan masih kental, mengingat bahwa antusiasme mereka masih berfokus pada kedaerahan, dan lebih aktif pada saat pemilihan kepala daerah ataupun kepala desa. Namun keaktifan

kaum perempuan hanya sebatas menggunakan hak suara pada saat pemilihan, dan tidak mengetahui visi dan misi dari calon. Bisa dikatakan bahwa peran kaum perempuan di desa Antutan dalam membangun budaya politik cenderung masih menganut sistem sosial tertentu dan bersifat tradisional.

2. Budaya Politik Subjek

Budaya politik subjek merupakan budaya dimana masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman cukup tinggi, tetapi masih bersifat pasif, artinya masyarakat sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, namun mereka belum memiliki orientasi dimensi pemahaman mengenai penguatan kebijakan dan partisipasi dalam kegiatan politik, mereka tidak memiliki keinginan dan kemauan untuk mencoba menilai, menelaah, atau mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa kaum perempuan dalam membangun budaya politi subjektif belum terlihat karena kaum perempaun hanya sebatas berpartisipasi dalam kegiata pemilihan. Kaum perempuan di desa Antutan cenderung tidak memahami visi dan misi yang dibuat oleh calon yang akan dipilih, tetapi mereka lebih dominan memilih calon yang dikenal.

Berikut Hasil Wawancara dengan Frety Agrisah selaku masyarakat desa Antutan terkait dengan peran kaum perempuan dalam membangun budaya politik yang berkaitan dengan budaya politik subjek yaitu...

Saya secara pribadi tidak terlalu memahami yang namanya politik, apa lagi berkaitan dengan kebijakan pemerintah, apa yang dibuat oleh pemerintah, itu yang kita ikuti. Mau mengkritik atau kasih masuk saran berkaitan dengan kebijakan kita tidak tahu (wawancara, 19 Juni 2021).

Hasil Wawancara dengan Gerhana Dewi S.Pd selaku masyarakat desa Antutan mengatakan bahwa...

Selama ini saya tidak terlalu terlibat dalam kegiatan politik, apa lagi mengkritik kebijakan pemerintah, kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah, saya patuhi (wawancara, 19 Juni 2021).

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Martin Ajang selaku Tokoh Masyarakat desa Antutan tentang peran kaum perempuan dalam membangun budaya politik yaitu....

Menurut saya, partisipasi perempuan dalam membangun budaya Politik Subjek belum terlihat karena kaum perempuan tidak mau tau urusan kebijakan pemerintah. Mereka hanya sebatas tahu ada kegiatan pemilihan saja tetapi untuk mendalami visi dan misi, serta kebijakan yang dikeluarkan tidak ada (wawancara, 19 Juni 2021).

Ditegaskan dengan hasil wawancara Tawie selaku Tokoh Masyarakat desa Antutan mengatakan bahwa

Yang berkaitan dengan kegiatan politik kami hanya mengikuti saja apa yang disarankan oleh pemerintah, walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan tetapi tetap kita jalankan. (wawancara, 19 Juni 2021).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik subjek belum berjalan karena kaum perempuan lebih cenderung pasif dan hanya

sekedar menerima apa yang dibuat oleh pemerintah. Kaum perempuan di desa Antutan masih terbatas dengan pengetahuan dan pemahaman tentang politik, mereka tidak memiliki keinginan dan kemauan untuk mencoba menilai, menelaah, atau mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kaum perempuan percaya terhadap pemerintah sekarang ini terutama terhadap kepala desa.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan merupakan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam kegiatan politik. Partisipasi kaum perempuan di desa Antutan dalam membangun budaya politik mulai bersifat aktif dalam peran-peran politik, dan itu dapat terlihat pada saat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pileg dan pemilihan kepala desa Antutan.

Budaya politik partisipan yang dibangun oleh kaum perempuan di desa Antutan belum berjalan dengan baik karena kaum perempuan cenderung aktif saat kegiatan pemilihan saja. Aktif dalam mengambil merumuskan dan memutuskan kebijakan di tingkat desa masih sangat terbatas.

Hasil Wawancara dengan Aminudin selaku kepala desa Antutan tentang partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan yaitu

Selama ini partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik dapat terlihat aktif pada saat kegiatan pemilihan, karena mereka juga tertarik memilih pilihan yang mereka kenal. Namun untuk terlibat atau aktif dalam kegiatan rapat, ataupun kegiatan

pembahasan tentang pembangunan desa, mereka lebih cenderung pasif. Yang paling dominan dalam kegiatan rapat serta mengambil keputusan dalam rapat hanya kaum laki-laki saja (wawancara, 16 Juni 2021).

Budaya politik partisipan kaum perempuan di desa Antutan pada kenyataannya bahwa kaum perempuan tidak terlalu berperan aktif dalam politik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kaum perempuan terkait dengan program dan kebijakan pemerintah cenderung pasif baik dalam hak politik maupun peran politik serta keberadaan dalam lembaga-lembaga politik, masih belum terwujud.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Riyon Rikartu selaku Sekertaris desa Antutan mengenai budaya politik partisipan kaum perempuan di desa Antutan yaitu

Kaum perempuan di desa Antutan selama ini sangat jarang dijumpai ikut berpartisipasi sekaligus berperan dalam partai politik. Kecenderungan partisipasi yang diikuti mencakup kegiatan pemilihan saja. (wawancara, 16 Juni 2021).

Hasil Wawancara dengan Edi Mulyadi selaku staf kantor desa Antutan menjelaskan bahwa :....

Partisipasi kaum perempuan di desa Antutan dalam membangun budaya politi partisipan belum terlihat, misalnya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, menjadi calon kepala desa, calon legislatif, calon Gubernur / Wakil Gubernur, Walikota / Wakil Walikota, Bupati / Wakil Bupati, dan lain sebagainya. (wawancara, 16 Juni 2021).

Ditegaskan oleh hasil wawancara dengan Aminudin selaku Kaur pemerintah desa Antutan yait

Budaya politik partisipan kaum perempuan di desa Antutan hanya terlihat pada saat kegiatan pemilihan saja, tetapi dalam mengambil keputusan dan menjadi calon pemimpin tidak terlihat (wawancara, 16 Juni 2021).

Dari beberapa kutipan wawancara di atas, penulis dapat simpulkan bahwa peran kaum perempuan dalam membangun budaya politik partisipan hanya terlihat pada saat kegiatan pemilihan calon kepala desa, calon legislatif, calon Gubernur, Walikota / Bupati / Wakil Bupati. Tetapi dalam kegiatan politik lainnya tidak terlihat, misalnya terlibat dalam mengambil keputusan, menjadi calon pemimpin, atau calon legislatif.

C. Pembahasan

Peran kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan ditunjukkan dengan sebagai kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung.

Kaum perempuan dalam membangun budaya politik dari partisipasi terlihat pada saat kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala desa. Partisipasi perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan dapat dikatakan sudah aktif pada saat kegiatan pemilu/pemilihan kepala daerah karena, mereka turut menyampaikan suara sesuai dengan undangan surat suara. Setiap ada

kegiatan pemilihan, kaum perempuan di desa Antutan terlibat dalam menggunakan hak suara.

Partisipasi aktif kaum perempuan dalam kegiatan pemilihan pada dasarnya karena mereka sudah mengenai calon yang akan dipilih, walaupun secara keseluruhan mereka tidak menghafal nama-nama calon, tetapi calon yang mereka mau pilih, pasti sudah dikenal dengan baik.

Budaya politik partisipan yang dibangun oleh kaum perempuan di desa Antutan merupakan budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran politik sehingga kaum perempuan di desa Antutan antusias mengikuti kegiatan pemilihan yang diselenggarakan. Keterlibatan kaum perempuan dalam pemilihan tentunya suatu dorongan dan kesadaran politik bahwa dengan menggunakan hak suara merupakan hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk memilih dan menentukan pemimpin selanjutnya.

2. Partisipasi Pasif

Partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik belum dapat berjalan dengan maksimal, mengingat bahwa kaum perempuan di desa Antutan disibukan dengan rutinitas iburumah tangga. Mereka hanya berperan sebatas terlibat dalam pemilihan dan menjadi pengurus/ panitia saat pemilihan umum, pilkada, pileg, dan pildes. Kaum perempuan tidak pernah menjadi calon legislator, Kepala Desa, atau ketua RW/RT, dan saat kegiatan rapat desa kaum perempuan tidak terlihat.

Partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik lebih pasif karena kurangnya keterlibatan perempuan dalam mengurus urusan pemerintahan, mereka lebih percaya kepada kaum laki-laki yang terlibat dalam politik di desa Antutan. Salah satu peran politik yang bersifat partisipasi pasif yaitu, hanya menerima kebijakan serta program yang dibuat oleh pemerintah Perempuan di desa Antutan cenderung pasif ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan pendapat atau keinginan mereka mereka lebih cenderung diam dan tidak mau protes langsung terkait dengan kebijakan yang dibuat, tidak mau tau dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa walaupun tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Partisipasi pasif tentu akan berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan daripada budaya politik di desa Antutan.

3. Golongan Putih

Dalam kegiatan politik terutama saat kegiatan pemilihan, kaum perempuan di desa Antutan turut berpartisipasi dalam menggunakan hak suara mereka untuk memilih pilihan mereka. Memahami dan menyadari bahwa satu suara sangat penting bagi mereka untuk mendukung pilihan yang dipilih. Oleh karena itu, kaum perempuan di desa Antutan jarang sekali yang Golput, rata-rata mereka menggunakan hak suara dengan datang sendiri ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan sudah dilaksanakan saat adanya kegiatan pemilihan umum,

pilkada, pileg, dan pildes walaupun secara keseluruhan belum terlihat peran kaum perempuan di Desa Antutan dalam kegiatan politik. Kaum perempuan selalu menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang dikenal dan memiliki visi dan misi yang jelas. Kesadaran kaum perempuan di desa Antutan untuk tidak golput merupakan kesadaran politik dalam memilih pemimpin yang demokratis.

Berikut ini pembahasan hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan di desa Antutan terkait dengan partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan :

1. Budaya Politik Parokial

Kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan cenderung bersifat budaya politik parokial, dimana kaum perempuan hanya lebih tertarik dalam pemilihan di daerah, terutama di desa. Kaum perempuan di desa Antutan tidak terlalu tertarik dengan politik, atau pemilihan umum, atau pemilihan anggota DPR, tetapi mereka lebih cenderung tertarik mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah, misalnya bupati, ataupun kepala desa.

Dikatakan kaum perempuan di desa Antutan lebih bersifat menganut budaya politik parokial karena tingkat kesadaran warga terhadap kewenangan dan aturan pusat pemerintahan negara masih rendah, dan kaum perempuan di desa Antutan lebih antusias pada politik yang berada di dalam

wilayahnya atau yang punya interaksi langsung dengan mereka. Misalnya berkaitan dengan pemilihan bupati, DPRD, ataupun kepala desa.

Budaya politik parokial pada kaum perempuan di desa Antutan masih kental, mengingat bahwa antusiasme mereka masih berfokus pada kedaerahan, dan lebih aktif pada saat pemilihan kepala daerah ataupun kepala desa. Namun keaktifan kaum perempuan hanya sebatas menggunakan hak suara pada saat pemilihan, dan tidak mengetahui visi dan misi dari calon. Bisa dikatakan bahwa peran kaum perempuan di desa Antutan dalam membangun budaya politik cenderung masih menganut sistem sosial tertentu dan bersifat tradisional.

2. Budaya Politik Subjek

Kaum perempuan dalam membangun budaya politik subjektif belum terlihat karena kaum perempuan hanya sebatas berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan. Kaum perempuan di desa Antutan cenderung tidak memahami visi dan misi yang dibuat oleh calon yang akan dipilih, tetapi mereka lebih dominan memilih calon yang dikenal. Kaum perempuan tidak mau tau urusan kebijakan pemerintah. Mereka hanya sebatas tahu ada kegiatan pemilihan saja tetapi untuk mendalami visi dan misi, serta kebijakan yang dibuat.

Partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik subjek belum berjalan karena kaum perempuan lebih cenderung pasif dan hanya sekedar menerima apa yang dibuat oleh pemerintah. Kaum

perempuan di desa Antutan masih terbatas dengan pengetahuan dan pemahaman tentang politik, mereka tidak memiliki keinginan dan kemauan untuk mencoba menilai, menelaah, atau mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kaum perempuan percaya terhadap pemeritahan sekarang ini terutama terhadap kepala desa.

3. Budaya Politik Partisipan

Partisipasi kaum perempuan di desa Antutan dalam membangun budaya politik bisa dikatakan belum maksimal dalam peran-peran politik, peran dan partisipasi mereka dapat terlihat pada saat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pileg dan pemilihan kepala desa Antutan.

Budaya politik partisipan yang dibangun oleh kaum perempuan di desa Antutan belum berjalan dengan baik karena kaum perempuan cenderung aktif saat kegiatan pemilihan saja. Aktif dalam mengambil atau merumuskan dan memutuskan kebijakan ditingkat desa masih sangat terbatas.

Hasil penelitian Listyaningsih (2016) Model Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Di Kota Serang Propinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan, peran dan fungsi perempuan pesisir yang menunjukkan semakin terbukanya ruang partisipasi namun perempuan masih belum terlibat secara aktif, yang mana hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya tingkat pendidikan.

Dari hasil penelitian di atas mendukung penelitian ini bahwa partisipasi kaum perempuan di desa Antutan belum terlibat atau aktif dalam politik secara keseluruhan, misalnya dalam kegiatan rapat, ataupun kegiatan pembahasan tentang pembangunan desa, mereka lebih cenderung pasif. Yang paling dominan dalam kegiatan rapat serta mengambil keputusan dalam rapat hanya kaum laki-laki saja. Budaya politik partisipan kaum perempuan di desa Antutan pada kenyataannya bahwa kaum perempuan tidak terlalu berperan aktif dalam politik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kaum perempuan terkait dengan program dan kebijakan pemerintah cenderung pasif baik dalam hak politik maupun peran politik serta keberadaan dalam lembaga-lembaga politik. Kaum perempuan di desa Antutan juga belum aktif atau kurang berpartisipasi dalam kampanye, menjadi calon kepala desa, calon legislatif, calon Gubernur / Wakil Gubernur, Walikota / Wakil Walikota, Bupati / Wakil Bupati, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebagai berikut : (1) Partisipasi Aktif, kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan ditunjukkan dengan cara menggunakan hak suara dalam kegiatan pemilihan. (2) Partisipasi Pasif, partisipasi kaum perempuan di desa Antutan belum pernah menjadi calon legislator, Kepala Desa, dan saat kegiatan rapat desa kaum perempuan tidak terlihat. Tetapi lebih cenderung menerima dan menjalankan kebijakan pemerintah. (3) Golongan Putih, dalam kegiatan politik terutama saat kegiatan pemilihan, kaum perempuan di desa Antutan turut berpartisipasi dalam menggunakan hak suara untuk memilih pilihan mereka. Oleh karena itu, kaum perempuan di desa Antutan jarang sekali yang Golput.

Berikut ini partisipasi kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dilihat dari beberapa budaya politik sebagai berikut:

1. Budaya Politik Parokial

Kaum perempuan dalam membangun budaya politik di desa Antutan cenderung bersifat budaya politik parokial, dimana kaum perempuan hanya

lebih tertarik dalam pemilihan di daerah, terutama di desa. Kaum perempuan di desa Antutan tidak terlalu tertarik dengan politik, atau pemilihan umum, atau pemilihan anggota DPR, tetapi mereka lebih cenderung tertarik mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah, misalnya bupati, ataupun kepala desa.

2. Budaya Politik Subjek

Kaum perempuan dalam membangun budaya politik subjektif belum terlihat karena kaum perempuan hanya sebatas berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan. Kaum perempuan di desa Antutan cenderung tidak memahami visi dan misi yang dibuat oleh calon yang akan dipilih, tetapi mereka lebih dominan memilih calon yang dikenal. Kaum perempuan tidak mau tau urusan kebijakan pemerintah. Mereka hanya sebatas tahu ada kegiatan pemilihan saja tetapi untuk mendalami visi dan misi, serta kebijakan yang dibuat tidak ada.

3. Budaya Politik Partisipan

Partisipasi kaum perempuan di desa Antutan dalam membangun budaya politik partisipan bisa dikatakan belum maksimal dalam peran-peran politik, peran partisipasi kaum perempuan di desa Antutan dapat terlihat pada saat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pileg dan pemilihan kepala desa Antutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Perlu meningkatkan partisipasi dan kaum perempuan di desa Antutan dalam kegiatan politik.
2. Perlu adanya penyuluhan dan pengarahan kepada kaum perempuan di desa Antutan untuk mengambil bagian dalam kegiatan politik.
3. Perlu melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan politik, seperti terlibat dalam mengambil keputusan, terlibat dalam partai politik

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. and G Bingham Powell, Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*. New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co, 1990 Anderson, Benedict.
- Bungin, M. Burhan, 2007. *Penelitian kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Coen Husain Pontoh. 2005. *Gerakan Massa Menghadang Imperealisme Global*, Yogyakarta: Resist Book.
- Demokrasi di Lima Negara-terj, Sahat Simamora, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaelan, M.S. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat : Paradigma*. Yogyakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistem Politik Indonesia. Suatu Model Pengantar*, PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung, cet, kedelapan.
- Listyaningsih. 2016. *Model Pemberdayaan Perempuan Pesisir Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Di Kota Serang Propinsi Banten*.
- Mansour Fakhri. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Insist Press).
- Mas'ood, Mochtar dan Mac Andrews. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miriam Budiarjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nur Hidayahb, Moh Aris Munandar. 2013. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Desa Tasik Agung Dalam Berpartisipasi Politik*.
- PiusA. Partan dan M. Dahlan Al-Barry. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

- Priandi, Rizki. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 1. 106. 10.14710/jphi.v1i1.106-116.
- Rush Althoff. 2003. Pengantar Sosiologi Politik, Rajawali Press.
- Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Sutopo, HB. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Zaitunah Subhan, 2004, Kesenjangan dan Keadilan Gender, www.menegpp.go.id

LAMPIRAN